



BUPATI BUNGO

**PROVINSI JAMBI
PERATURAN BUPATI BUNGO**

NOMOR 06 TAHUN 2016

TENTANG

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA
DUSUN SETIAP DUSUN DALAM KABUPATEN BUNGO
TAHUN ANGGARAN 2016**



**BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BUNGO
TAHUN 2016**



BUPATI BUNGO
PROVINSI JAMBI
PERATURAN BUPATI BUNGO
NOMOR 06 TAHUN 2016
TENTANG

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DUSUN SETIAP
DUSUN DALAM KABUPATEN BUNGO TAHUN ANGGARAN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUNGO,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, ketentuan mengenai tata cara pembagian dan penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Dusun Setiap Dusun Dalam Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

- 2 -
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5495);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1967);
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1934);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DUSUN SETIAP DUSUN DALAM KABUPATEN BUNGO TAHUN ANGGARAN 2016

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Dusun adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Dana Dusun adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Dusun yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;

3. Pemilihan Dusun adalah Rio membantu perangkat Dusun sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Dusun;
4. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Dusun, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat BPPMPD&KB adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Dusun, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
5. Rio adalah Kepala Pemerintahan Dusun;
6. Sekretaris adalah Sekretaris Dusun;
7. Jumlah Dusun adalah jumlah Dusun yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Dusun, yang selanjutnya disingkat APB Dusun, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Dusun;

BAB II TATA CARA PEMBAGIAN DANA DESA

Pasal 2

- (1) Dana Dusun untuk setiap Dusun dalam Kabupaten Bungo ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Dana Dusun setiap Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung secara berkeadilan berdasarkan:
 - a. alokasi dasar; dan
 - b. alokasi proporsional, yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis setiap Dusun.
- (3) Tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditunjukkan oleh Indeks Kesulitan Geografis (IKG) dusun yang ditentukan oleh faktor yang terdiri atas:
 - a. ketersediaan prasarana pelayanan dasar;
 - b. kondisi infrastruktur; dan
 - c. aksesibilitas/ transportasi.
- (4) Bupati menyusun dan menetapkan IKG Dusun berdasarkan faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis setiap Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 3

- (1) Alokasi proporsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, dibagi ke setiap Dusun dengan rumus sebagai berikut:

$$W = (0,25 * Z1) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4)$$

Keterangan:

W = alokasi proporsional suatu dusun;

Z1 = rasio jumlah penduduk dusun terhadap total penduduk Dusun dalam Kabupaten Bungo;

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin dusun terhadap total penduduk miskin Dusun dalam Kabupaten Bungo;

Z3 = rasio luas wilayah dusun terhadap luas wilayah seluruh dusun dalam Kabupaten Bungo;

Z4 = rasio Indeks Kesulitan Geografis (IKG) Dusun terhadap total IKG seluruh dusun Kabupaten yang bersangkutan;

Pasal 4

Rincian dana dusun untuk setiap dusun di Kabupaten Bungo tahun Anggaran 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PENYALURAN DANA DUSUN

Pasal 5

- (1) Penyaluran dana dusun dilakukan dalam pemindahbukuan dari Rekening kas umum daerah ke rekening kas dusun.
- (2) Penyaluran dana dusun dilakukan secara bertahap, sebagai berikut:
 - a. tahap I pada bulan April sebesar 40% (empat puluh perseratus);
 - b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus); dan
 - c. tahap III pada bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh perseratus).

Pasal 6

- (1) Dalam menyalurkan dana dusun dari rekening kas umum daerah ke rekening kas dusun Kepala BKMPP&KB mengeluarkan surat rekomendasi penyaluran dana dusun terhadap dusun yang bersangkutan.
- (2) Surat Rekomendasi untuk penyaluran dana dusun tahap I diberikan setelah Rio menyampaikan peraturan dusun tentang APB Dusun dan laporan realisasi penggunaan dana dusun Tahun Anggaran sebelumnya paling lambat minggu kedua bulan maret.
- (3) Surat Rekomendasi untuk penyaluran dana dusun tahap II diberikan setelah Rio menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana dusun tahap I paling lambat minggu kedua bulan juli.
- (4) Laporan realisasi penggunaan dana dusun tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat paling kurang dana dusun tahap I telah digunakan sebesar 50% (lima puluh per seratus)
- (5) Surat Rekomendasi untuk penyaluran dana dusun tahap III diberikan setelah Rio menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana dusun tahap I dan tahap II paling lambat minggu kedua bulan september.
- (6) Laporan realisasi penggunaan dana dusun tahap I dan II sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menunjukkan paling kurang dana dusun tahap I dan tahap II telah digunakan sebesar 50% (lima puluh per seratus).
- (7) peraturan dusun tentang APB Dusun dan laporan realisasi penggunaan dana dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) disampaikan kepada Bupati c.q Kepala BKMPP&KB melalui Camat.
- (8) peraturan dusun tentang APB Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah peraturan dusun tentang APB Dusun yang telah diverifikasi oleh tim verifikator yang ditunjuk oleh Bupati melalui Keputusan Bupati.
- (9) Rincian penggunaan dana dusun yang diterima dusun setiap tahun

BAB IV
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DUSUN

Pasal 7

- (1) Dana dusun diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal dusun bidang pembangunan dusun dan pemberdayaan masyarakat dusun
- (2) Prioritas penggunaan dana dusun didasarkan pada prinsip-prinsip:
 - a. keadilan, yaitu mengutamakan hak atau kepentingan seluruh warga dusun tanpa membeda-bedakan;
 - b. kebutuhan Prioritas, yaitu mendahulukan yang kepentingan dusun yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat dusun; dan
 - c. tipologi dusun, yaitu mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi dusun yang khas, serta perubahan atau perkembangan kemajuan dusun.
- (3) Prinsip tipologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dalam penyusunannya harus berdasarkan kekerabatan dusun, hamparan, pola pemukiman, mata pencarian, dan/atau tingkat perkembangan kemajuan dusun.

Pasal 8

Prioritas penggunaan dana dusun sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) salah satunya adalah untuk peningkatan kapasitas aparatur dusun dan BPD.

Pasal 9

Pengelolaan keuangan dusun dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

BAB V
PENYUSUNAN DAN LAPORAN REALISASI

Pasal 10

- (1) Format laporan realisasi penggunaan dana dusun sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan dana dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Laporan Realisasi Tahun Anggaran sebelumnya paling lambat minggu kedua bulan Maret tahun anggaran berjalan;
 - b. tahap I paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan
 - c. tahap I & II paling lambat minggu kedua bulan September tahun anggaran berjalan.

BAB VI
SANKSI

Pasal 11

- (1) Bupati menunda penyaluran dana dusun dalam hal:
 - a. Rio belum menyampaikan Perdus tentang APB Dusun; dan/atau
 - b. Rio belum menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana dusun tahap sebelumnya; dan/atau
 - c. Terdapat SiLPA dana dusun melebihi 30% (tiga puluh per seratus); dan/atau
 - d. Terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional Daerah.
- (2) Penundaan yang dikarenakan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan sampai dengan dikeluarkannya surat usulan dari aparat pengawas fungsional Daerah agar dana dusun kembali disalurkan.
- (3) Penundaan penyaluran dana dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan terhadap penyaluran dana dusun tahap I tahun anggaran berjalan sebesar SiLPA dana dusun tahun anggaran sebelumnya.
- (4) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap dusun yang terdapat SiLPA melebihi 30% (tiga puluh perseratus) berupa :
 - a. Meminta penjelasan kepada Rio mengenai SiLPA dana dusun tersebut;
 - b. Meminta aparat pengawas fungsional Daerah untuk melakukan pemeriksaan.
- (5) Pengurangan penyaluran dana dusun dilaporkan oleh Bupati kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

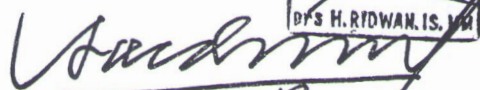
Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal 14 - 3 - 2016

BUPATI BUNGO,



H. SUDIRMAN ZAINI

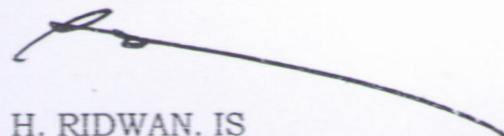
TELAH DITELITI KEBENARANNYA;
KEPALA BPMPDPP & KB K/AB. BUNGO


Drs. H. NAWAWI, MM

NIP. 196312311992031077

Diundangkan di Muara Bungo
pada tanggal 14 - 3 - 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO,

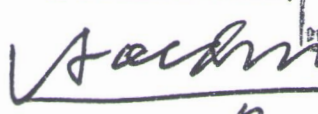

H. RIDWAN. IS

No.	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Berdasarkan Formula		Pagu Dana Dusun per-Dusun
			Total Bobot	Alokasi Berdasarkan Formula	
1	2	3	4	5	6
KECAMATAN TANAH SEPENGGAL					
28	TELUK PANDAK	565,640,000.00	0.61%	40,146,464.03	605,786,000
29	EMPELU	565,640,000.00	0.63%	41,725,981.72	607,366,000
30	PASAR LUBUK LANDAI	565,640,000.00	0.73%	48,410,337.45	614,050,000
31	SUNGAI GAMBIR	565,640,000.00	1.35%	89,563,712.02	655,204,000
32	CANDI	565,640,000.00	1.11%	73,399,654.00	639,040,000
33	TANJUNG	565,640,000.00	1.20%	79,820,902.12	645,461,000
34	TANAH BEKALI	565,640,000.00	0.70%	46,325,683.91	611,966,000
35	TELENTAM	565,640,000.00	0.62%	41,203,341.08	606,843,000
36	PASAR RANTAU EMBACANG	565,640,000.00	0.71%	47,165,094.53	612,805,000
37	TENAM	565,640,000.00	0.48%	31,681,156.65	597,321,000
KECAMATAN PELEPAT					
38	BARU PELEPAT	565,640,000.00	0.55%	36,351,433.44	601,991,000
39	DWI KARYA BAKTI	565,640,000.00	0.99%	65,622,846.26	631,263,000
40	RANTAU KELOYANG	565,640,000.00	1.47%	97,703,291.55	663,343,000
41	BALAI JAYA	565,640,000.00	0.75%	49,932,825.43	615,573,000
42	RANTEL	565,640,000.00	0.92%	61,119,897.88	626,760,000
43	SENAMAT	565,640,000.00	1.34%	88,864,957.94	654,505,000
44	SUNGAI BERINGIN	565,640,000.00	1.07%	70,816,392.87	636,456,000
45	SUNGAI GURUN	565,640,000.00	0.45%	29,679,330.99	595,319,000
46	BATU KERBAU	565,640,000.00	1.30%	86,251,048.39	651,891,000
47	GAPURA SUCI	565,640,000.00	0.82%	54,616,400.77	620,256,000
48	MULYA BAKTI	565,640,000.00	0.39%	25,991,871.43	591,632,000
49	MULYA JAYA	565,640,000.00	0.51%	34,006,706.48	599,647,000
50	CIODANG	565,640,000.00	0.45%	29,594,789.42	595,235,000
51	BUKITTELAGO	565,640,000.00	0.82%	54,528,953.45	620,169,000
52	SEKAMPIL	565,640,000.00	0.97%	64,603,315.04	630,243,000
KECAMATAN LIMBUR LUBUK MENGGUANG					
53	TANJUNG BUNGO	565,640,000.00	0.48%	31,962,867.65	597,603,000
54	TUO LBK. MENGGUANG	565,640,000.00	0.45%	29,615,400.77	595,255,000
55	PAUH AGUNG	565,640,000.00	0.72%	47,649,499.46	613,289,000
56	TUO LIMBUR	565,640,000.00	0.40%	26,195,922.25	591,836,000
57	RENAH SUNGAI BESAR	565,640,000.00	0.45%	29,591,039.69	595,231,000
58	MUARO TEBO PANDAK	565,640,000.00	0.51%	34,152,115.70	599,792,000
59	RANTAU TIPU	565,640,000.00	0.81%	53,696,759.93	619,337,000
60	BARU LBK. MENGGUANG	565,640,000.00	0.50%	33,433,837.32	599,074,000
61	LBK. TANAH TERBAN	565,640,000.00	0.49%	32,349,965.91	597,990,000
62	PEMUNYIAN	565,640,000.00	1.00%	66,375,820.03	632,016,000
63	RENAH SUNGAI IPUH	565,640,000.00	0.53%	35,431,275.29	601,071,000
64	TEBO JAYA	565,640,000.00	0.40%	26,597,162.18	592,237,000
65	SEKAR MENGGUANG	565,640,000.00	0.50%	32,858,863.96	598,499,000
66	LIMBUR BARU	565,640,000.00	0.62%	41,248,942.15	606,889,000

No.	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Berdasarkan Formula		Pagu Dana Dusun per-Dusun
			Total Bobot	Alokasi Berdasarkan Formula	
1	2	3	4	5	6
KECAMATAN MUKO MUKO BATHIN VII					
67	MANGUN JAYO	565,640,000.00	0.70%	46,149,614.92	611,790,000
68	TANJUNG AGUNG	565,640,000.00	1.21%	80,114,583.54	645,755,000
69	TEBAT	565,640,000.00	0.61%	40,643,996.36	606,284,000
70	BARU PUSAT JALO	565,640,000.00	0.55%	36,314,186.77	601,954,000
71	BEDARO	565,640,000.00	1.27%	83,989,473.38	649,629,000
72	TEBING TINGGI	565,640,000.00	0.69%	45,927,535.27	611,568,000
73	DATAR	565,640,000.00	0.35%	23,231,000.84	588,871,000
74	SUKA JAYA	565,640,000.00	0.39%	25,722,559.50	591,363,000
75	PEKAN JUM'AT	565,640,000.00	0.45%	29,813,343.29	595,453,000
KECAMATAN PELEPAT ILIR					
76	KOTO JAYO	565,640,000.00	0.74%	48,743,406.67	614,383,000
77	DANAU	565,640,000.00	1.05%	69,734,748.09	635,375,000
78	MUARA KUAMANG	565,640,000.00	0.61%	40,642,509.81	606,283,000
79	LUBUK	565,640,000.00	0.41%	27,064,531.19	592,705,000
80	PURWOSARI	565,640,000.00	1.03%	68,346,210.10	633,986,000
81	LEMBAH KUAMANG	565,640,000.00	0.58%	38,733,878.59	604,374,000
82	SUMBER HARAPAN	565,640,000.00	0.75%	49,451,007.13	615,091,000
83	DAYA MURNI	565,640,000.00	0.59%	38,924,371.38	604,564,000
84	SUMBER MULYA	565,640,000.00	0.39%	26,099,731.29	591,740,000
85	MAJU JAYA	565,640,000.00	0.54%	35,559,747.05	601,200,000
86	TIRTA MULYA	565,640,000.00	0.57%	37,691,776.73	603,332,000
87	LINGGA KUAMANG	565,640,000.00	0.80%	53,050,373.33	618,690,000
88	BANGUN HARJO	565,640,000.00	0.58%	38,505,109.76	604,145,000
89	KUNING GADING	565,640,000.00	0.55%	36,450,734.14	602,091,000
90	KUAMANG JAYA	565,640,000.00	0.47%	31,336,799.72	596,977,000
91	KARYA HARAPAN MUKTI	565,640,000.00	0.60%	39,924,155.62	605,564,000
92	PADANG PALANGEH	565,640,000.00	0.74%	49,135,093.80	614,775,000
KECAMATAN BATHIN II BABEKO					
93	TANJUNG MENANTI	565,640,000.00	0.50%	33,153,356.72	598,793,000
94	BABEKO	565,640,000.00	0.69%	45,885,335.33	611,525,000
95	SEPUNGGUR	565,640,000.00	0.79%	52,637,547.08	618,278,000
96	SIMPANG BEBEKO	565,640,000.00	0.50%	32,871,409.84	598,511,000
97	SUKA MAKMUR	565,640,000.00	0.33%	21,745,820.71	587,390,000
98	TUO SEPUNGGUR	565,640,000.00	0.61%	40,158,660.85	605,799,000
KECAMATAN BATHIN III					
99	LUBUK BENTENG	565,640,000.00	0.42%	28,051,427.19	593,691,000
100	AIR GEMURUH	565,640,000.00	0.68%	45,178,482.56	610,818,000
101	PURWO BAKTI	565,640,000.00	0.53%	35,446,267.26	601,086,000
102	SARANA JAYA	565,640,000.00	0.58%	38,605,600.97	604,246,000
103	TELUK PANJANG	565,640,000.00	0.93%	61,834,385.51	627,474,000
KECAMATAN BUNGO DANI					
104	TALANG PANTAI	565,640,000.00	0.72%	47,821,525.03	613,462,000
105	SUNGAI ARANG	565,640,000.00	1.25%	82,833,019.59	648,473,000
106	PULAU PEKAN	565,640,000.00	0.44%	29,243,964.67	594,884,000
KECAMATAN RIMBO TENGAH					
107	SUNGAI MENGKUANG	565,640,000.00	1.48%	97,877,283.59	663,517,000
108	SUNGAI BULUH	565,640,000.00	0.46%	30,789,181.51	596,429,000

No.	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Berdasarkan Formula		Pagu Dana Dusun per-Dusun
			Total Bobot	Alokasi Berdasarkan Formula	
1	2	3	4	5	6
KECAMATAN BATHIN III ULU					
109	MUARA BUAT	565,640,000.00	0.63%	41,519,328.92	607,159,000
110	BUAT	565,640,000.00	1.04%	68,970,836.29	634,611,000
111	LAMAN PANJANG	565,640,000.00	0.77%	51,070,473.75	616,710,000
112	KARAK APUNG	565,640,000.00	0.92%	61,116,659.13	626,757,000
113	TIMBOLASI	565,640,000.00	0.84%	55,986,130.50	621,626,000
114	SENAMAT ULU	565,640,000.00	0.91%	60,254,445.95	625,894,000
115	AUR CINO	565,640,000.00	0.72%	48,026,085.49	613,666,000
116	LUBUK BERINGIN	565,640,000.00	0.56%	37,252,448.56	602,892,000
117	SUNGAI TELANG	565,640,000.00	1.82%	120,667,880.36	686,308,000
KECAMATAN BATHIN II PELAYANG					
118	PELAYANG	565,640,000.00	1.11%	73,468,513.92	639,109,000
119	PENINJAU	565,640,000.00	0.69%	45,718,700.93	611,359,000
120	TALANG SELUNGKO	565,640,000.00	0.69%	45,978,228.07	611,618,000
121	PULAU KERAKAP	565,640,000.00	0.44%	29,004,855.80	594,645,000
122	SEBERANG JAYA	565,640,000.00	0.57%	38,006,474.80	603,646,000
KECAMATAN JUJAHAN ILIR					
123	TEPIAN DANTO	565,640,000.00	0.55%	36,665,401.30	602,305,000
124	AUR GADING	565,640,000.00	0.36%	24,069,597.50	589,710,000
125	PULAU BATU	565,640,000.00	0.54%	35,912,312.15	601,552,000
126	SARI MULYA	565,640,000.00	0.82%	54,337,982.24	619,978,000
127	BUKIT SARI	565,640,000.00	0.52%	34,499,349.55	600,139,000
128	LUBUK TENAM	565,640,000.00	0.49%	32,184,450.98	597,824,000
129	KUAMANG	565,640,000.00	0.36%	23,760,509.92	589,401,000
KECAMATAN TANAH SEPENGGAL LINTAS					
130	SUNGAI MANCUR	565,640,000.00	0.48%	32,141,643.36	597,782,000
131	TANAH PERIUK	565,640,000.00	0.83%	54,946,037.29	620,586,000
132	LUBUK LANDAI	565,640,000.00	2.65%	175,824,289.46	741,464,000
133	RANTAU EMBACANG	565,640,000.00	0.86%	57,184,576.19	622,825,000
134	TEBING TINGGI	565,640,000.00	1.02%	67,836,581.22	633,477,000
135	EMBACANG GEDANG	565,640,000.00	0.52%	34,427,161.99	600,067,000
136	SUNGAI PURI	565,640,000.00	0.53%	35,078,522.20	600,719,000
137	PAKU AJI	565,640,000.00	0.65%	43,135,935.43	608,776,000
138	PEMATANG PANJANG	565,640,000.00	0.54%	35,483,710.40	601,124,000
139	SUNGAI LILIN	565,640,000.00	1.23%	81,576,497.31	647,216,000
140	SUNGAI TEMBANG	565,640,000.00	0.74%	49,315,317.23	614,955,000
141	RANTAU MAKMUR	565,640,000.00	0.63%	41,881,549.63	607,522,000
TOTAL		79,755,240,009	1300.00%	6,631,710,015	86,386,950,018

BUPATI BUNGO,



H. SUDIRMAN ZAINI



LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BUNGO
 NOMOR TAHUN 2016
 TENTANG
 TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN
 DANA DUSUN SETIAP DUSUN DALAM KABUPATEN
 BUNGO TAHUN ANGGARAN 2016

FORMAT LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DUSUN

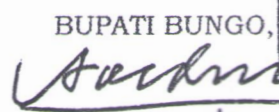
LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DUSUN
 TAHAP TAHUN ANGGARAN
 PEMERINTAH DUSUN
 KABUPATEN BUNGO

Pagu Dusun : Rp.

KODE REKENE- NG	URAIAN	NOMOR DAN TANGGAL BUKTI PENYALURAN (SP2D)	JUMLAH PENERIMAAN (DEBIT) Rp.	JUMLAH PENGELUARAN (KREDIT) Rp.	SALDO Rp.	KET.
1	2	3	4	5	6	7
1.	PENDAPATAN					
1.2	Pendapatan Transfer					
1.2.1	Dana Dusun					
	- Tahap I					
	- Tahap II					
	- Tahap III					
2	BELANJA					
2.1	<i>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan</i>					
2.1.1	Kegiatan					
2.1.2	Kegiatan					
2.1.3	dst					
2.2	<i>Bidang Pelaksanaan Pembangunan</i>					
2.2.1	Perbaikan Saluran Irigasi					
2.2.2	Pengaspalan Jalan Dusun					
2.2.3	dst					
2.3	<i>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</i>					
2.3.1	Kegiatan					
2.3.2	Kegiatan					
2.3.3	dst					
2.4	<i>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</i>					
2.4.1	Kegiatan					
2.4.2	Kegiatan					
2.4.3	dst					

BENDAHARA DUSUN,

Disetujui Oleh :
 RIO,

BUPATI BUNGO,

 H. SUDIRMAN ZAINI

